

Artikel

Identifikasi Potensi Dampak Berkelanjutan Rencana Pembangunan Bandara Bali Utara: Persepsi Masyarakat Terdampak

Dani Lukmito Utomo^{1,*} Budi Mulyanto², dan Dyah Retno Panuju³

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Bali

² Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, IPB University, Bogor, Jawa Barat

³ Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Bogor, Jawa Barat

Korespondensi: [*danilukmitoutomo@gmail.com](mailto:danilukmitoutomo@gmail.com)

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.403> | halaman: 430–446

Abstrak

Pembangunan Bandara Bali Utara, yang merupakan bagian dari intervensi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024–2029, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Namun, pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur ini akan menimbulkan tantangan keberlanjutan yang signifikan, terutama bagi masyarakat terdampak di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*), yang menggabungkan analisis spasial kuantitatif dengan survei dan wawancara kualitatif, untuk menilai potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan bandara berdasarkan perspektif masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa 277 bidang tanah hasil redistribusi, yang sebagian besar berupa lahan pertanian (96,75%), terdampak secara langsung, sehingga mengancam keberlanjutan mata pencaharian dan penggunaan lahan. Persepsi masyarakat, yang diukur menggunakan Skala Guttman, menunjukkan kesadaran tinggi terhadap dampak positif, seperti peluang ekonomi, dan diversifikasi pekerjaan, maupun dampak negatif, seperti degradasi lingkungan dan disrupsi sosial. Meskipun responden menyatakan optimisme terhadap manfaat ekonomi, kekhawatiran mengenai kompensasi yang tidak memadai, spekulasi lahan, dan pencemaran lingkungan menekankan perlunya kebijakan pengadaan tanah yang inklusif dan transparan. Studi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, kompensasi yang adil, dan upaya mitigasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diajukan meliputi program pelatihan keterampilan untuk transisi mata pencaharian, kerangka kompensasi yang berkeadilan, serta penguatan keterlibatan publik dalam proses perencanaan.

Kata Kunci: keberlanjutan; pengadaan tanah; pembangunan bandara; persepsi masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas aksesibilitas layanan dasar, serta meningkatkan efisiensi logistik, yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Bayoumi et al., 2021). Namun demikian, tahapan awal pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya dalam proses pengadaan tanah, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut memiliki berbagai aspek, terutama ketika dihadapkan pada masyarakat lokal yang terkena dampak langsung. Apabila pengadaan tanah dipersepsikan sebagai bentuk perampasan lahan oleh masyarakat lokal, hal tersebut biasanya menimbulkan resistensi atau penolakan dari pihak tersebut (Sändig, 2021).

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengencangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan. Salah satu proyek yang direncanakan oleh pemerintah, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029, adalah pembangunan Bandara Bali Utara, yang berlokasi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Rencana tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bali. Studi terbaru menunjukkan bahwa Bali bagian selatan, dengan pusat pariwisata seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara Bali bagian utara relatif tertinggal (Pratiwi et al., 2023; Utomo, 2024). Keberadaan bandara tersebut diharapkan menjadi katalis pemerataan pembangunan, mendorong kesejahteraan masyarakat Bali di bagian utara, sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi pada Bali di bagian selatan. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan transportasi yang mudah diakses dan pemerataan pembangunan di seluruh Bali (Pramana, 2021). Pembangunan infrastruktur transportasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta kedatangan wisatawan (Jama et al., 2024).

Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Terpadu Batuampar, pemanfaatan ruang untuk transportasi bandar udara direncanakan berada di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Namun, desa tersebut baru saja melakukan kegiatan reforma agraria dengan melaksanakan program redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat (Utomo et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap berbagai persepsi masyarakat yang timbul sebagai langkah strategis untuk merumuskan upaya antisipasi dan mitigasi potensi dampak negatif yang dapat terjadi akibat perubahan pemanfaatan ruang di Desa Sumberklampok pasca reforma agraria. Persepsi masyarakat terhadap suatu proyek pembangunan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi dan dukungan mereka (Shinyanga et al., 2023). Apabila persepsi masyarakat tidak dipahami secara mendalam, kondisi tersebut berpotensi menghambat atau bahkan menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan rencana pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah dipengaruhi oleh berbagai perspektif, seperti nilai-nilai keadilan, dampak sosial-ekonomi, dan tingkat kesadaran publik terhadap kebijakan pemerintah. Holtslag-Broekhof et al. (2016) menemukan bahwa persepsi pemilik tanah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, termasuk keabsahan, kepatutan, dan kesetaraan, yang harus disertai dengan proses pengadaan tanah yang akurat dan transparan. Sementara itu, Said dan Irwansyah (2019) mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali merasa dirugikan secara sosial-ekonomi akibat ketidakadilan dalam

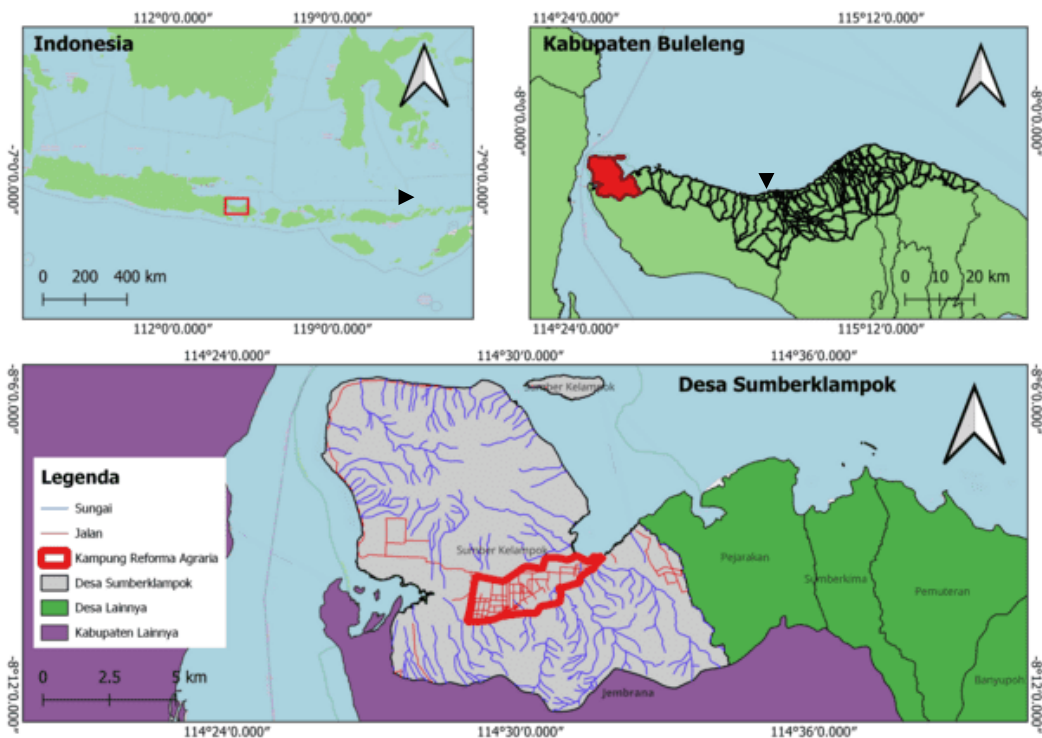
kompensasi maupun implementasinya, sehingga cenderung menolak pengambilalihan tanah oleh pemerintah. Guha (2014) menunjukkan bahwa pengadaan tanah memunculkan beragam opini di masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik terhadap kebijakan tersebut, yang secara langsung memengaruhi kesadaran publik. Meskipun berbagai studi telah mengidentifikasi hal-hal tersebut, penelitian yang secara khusus menghubungkan isu pengadaan tanah dari sudut pandang keberlanjutan berdasarkan persepsi masyarakat masih terbatas. Penelitian mendalam yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengadaan tanah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Berapa estimasi kebutuhan subjek dan objek yang diperlukan untuk pengadaan tanah di Desa Sumberklompok? dan (2) Bagaimana persepsi masyarakat terdampak terhadap pengadaan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara berdasarkan dimensi keberlanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak yang muncul berdasarkan persepsi masyarakat terdampak terkait proses pengadaan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan rencana pembangunan tersebut, khususnya di Desa Sumberklompok, Kabupaten Buleleng, yang merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) (Kartika, 2017). Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi strategis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan pengadaan tanah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

II. Metode

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang menjadi lokasi utama dalam rencana pemanfaatan ruang untuk transportasi bandar udara sebagaimana diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Terpadu Batuampar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Lokasi spesifik penelitian berfokus pada Kawasan Kampung Reforma Agraria di Desa Sumberklompok (Gambar 1), yang merupakan area pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2021 hingga 2023. Kampung Reforma Agraria merupakan manifestasi keberhasilan penyelenggaraan reforma agraria pada suatu wilayah, yang mencakup penataan aset, penggunaan tanah, dan akses bagi masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2024). Kawasan Kampung Reforma Agraria di Desa Sumberklompok merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (Eks-HGU) yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui program reforma agraria.

Desain penelitian menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dengan pendekatan transformatif, yang mengombinasikan metode kuantitatif yang ditindaklanjuti dengan metode kualitatif (Creswell, 2012). Penelitian diawali dengan pendekatan kuantitatif untuk menghitung estimasi jumlah subjek dan objek yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah di Desa Sumberklompok serta mengukur tingkat potensi dampak pengadaan tanah terhadap masyarakat terdampak melalui survei. Hasil dari analisis kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali persepsi masyarakat terdampak terkait pengadaan tanah dan memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif dan interpretasi mendalam terhadap hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018).



Gambar 1 . Lokasi penelitian di Desa Sumberklampok

Sumber : BPN Buleleng (2021)

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara persepsi masyarakat. Survei dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terdampak terhadap potensi dampak pengadaan tanah. Wawancara singkat dilakukan dengan masyarakat pemilik bidang redistribusi tanah yang berpotensi terdampak pengadaan tanah untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam. Data sekunder yang digunakan mencakup informasi persil bidang redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, RDTR Kawasan Terpadu Batuampar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, serta dokumen peraturan dan kebijakan yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan konteks terhadap temuan penelitian.

Data persil bidang redistribusi tanah dan pola ruang RDTR Kawasan Terpadu Batuampar dianalisis menggunakan teknik overlay spasial untuk mengestimasi jumlah subjek dan objek reforma agraria yang berpotensi terdampak rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Teknik tersebut dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan data spasial dalam jumlah besar secara cepat dan efisien (Lu-qun, 2002), memungkinkan identifikasi bidang tanah terdampak akibat pengembangan infrastruktur bandara. Hasil analisis overlay digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian melalui rumus Slovin, dengan populasi penelitian ditentukan berdasarkan estimasi jumlah subjek yang berpotensi terdampak pengadaan tanah. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata dalam suatu populasi (Sugiyono, 2013). Perhitungan jumlah responden dilakukan dengan rumus Slovin pada Persamaan 1, di mana n merepresentasikan ukuran sampel, N ukuran populasi, dan margin of error ditetapkan sebesar 10% (Sevilla et al., 1984).

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \quad (1)$$

Survei dilakukan dengan menggunakan pengukuran Skala Guttman untuk mengumpulkan opini masyarakat terdampak secara tegas melalui dua pilihan jawaban yang saling bertolak belakang (Sugiyono, 2013). Data survei tersebut dirancang untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara sistematis, dengan variabel seperti pada Tabel 1. Hasil survei dihitung dan diidentifikasi tingkatannya. Perhitungan nilai Skala Guttman menggunakan rumus pada Persamaan 2, sedangkan tingkatan potensi dampak diidentifikasi berdasarkan Tabel 2.

$$\text{Nilai Skala} = \frac{\sum \text{Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jawaban Kuesioner}} \quad (2)$$

Tabel 1. Variabel potensi dampak pengembangan infrastruktur bandara

Dimensi	Variabel	Dampak	Sumber
Sosial	Mata pencaharian	Negatif	Azizah (2017); Utami et al. (2023)
	Alih profesi	Positif	Azizah (2017); Rijanta et al. (2022); Utami et al. (2023)
	Bantuan pelatihan	Positif	Azizah (2017); Susanto (2020)
	Kepadatan penduduk	Negatif	Susanto (2020)
	Nilai dan moral	Negatif	Susanto (2020)
	Keamanan	Negatif	Rijanta et al. (2022)
Ekonomi	Usaha lokal	Positif	Azizah (2017); Susanto (2020)
	Sektor perekonomian baru	Positif	Susanto (2020)
	Pengadaan tanah	Negatif	ICAO (2002)
	Kompensasi/ganti kerugian	Positif	Azizah (2017); Rijanta et al. (2022); Susanto (2020)
Lingkungan	Kualitas tanah dan air	Negatif	ICAO (2002); Rijanta et al. (2022); Sadono et al. (2021); Susanto (2020)
	Kualitas udara	Negatif	ICAO (2002); Rijanta et al. (2022); Sadono et al. (2021); Susanto (2020)
	Kebisingan	Negatif	ICAO (2002); Sadono et al. (2021)
	Alih fungsi lahan	Negatif	Utami et al. (2023)
	Persampahan	Negatif	ICAO (2002)

Tabel 2. Kategori Skala Guttman

No.	Nilai Skala	Keterangan
1	0,00 – 0,25	Potensi dampak rendah
2	0,26 – 0,50	Potensi dampak cukup rendah
3	0,51 – 0,75	Potensi dampak cukup tinggi
4	0,76 – 1,00	Potensi dampak tinggi

Sumber : Sugiyono (2013); Yulia & Setianingsih (2020) dengan modifikasi

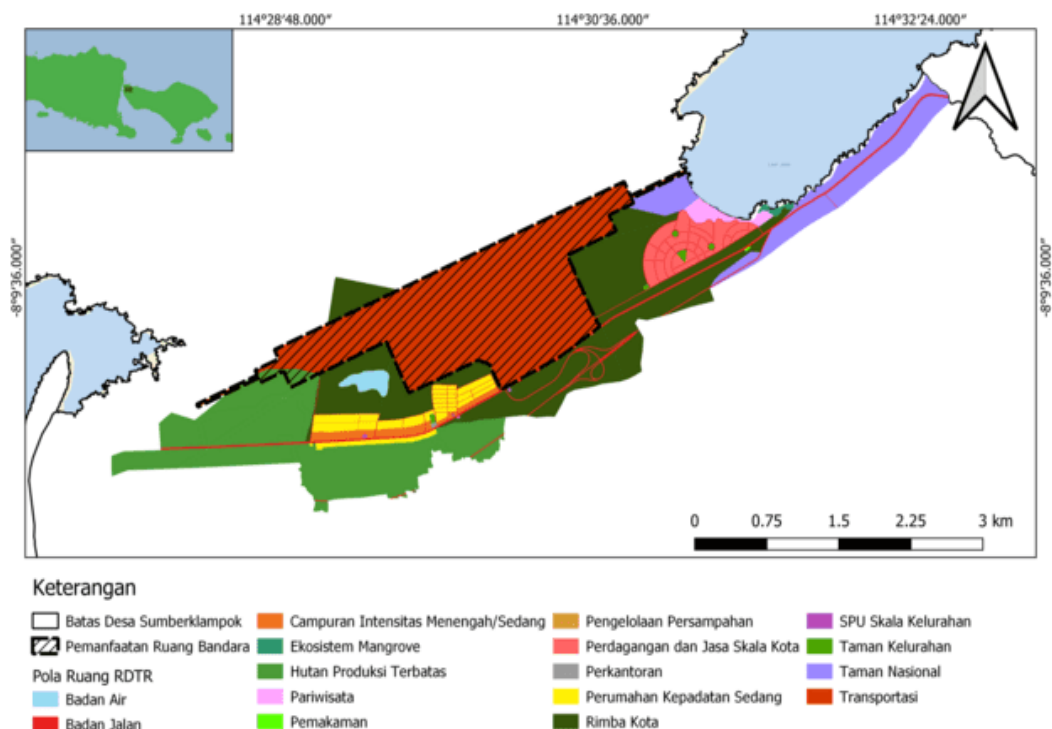
Proses pengukuran dengan Skala Guttman diikuti oleh uji validitas dan reliabilitas guna menjamin keakuratan dan konsistensi alat penelitian yang digunakan. Validitas merujuk pada sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur konsep yang dimaksud secara akurat, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Sementara itu, reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil yang diperoleh ketika instrumen yang sama diterapkan dalam kondisi serta waktu yang serupa (Heale & Twycross, 2015).

Setelah diperoleh hasil tingkat potensi dampak melalui pengukuran Skala Guttman, wawancara singkat dilakukan dengan responden untuk menggali pandangan mereka terkait potensi dampak pengadaan tanah, sebagai tindak lanjut dari kuesioner yang sebelumnya mereka isi. Data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk dipetakan secara sistematis. Analisis deskriptif tersebut melibatkan proses pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data guna memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dan fenomena terkait (Rosmiati et al., 2020). Pemetaan tersebut secara deskriptif disajikan dengan pendekatan Miles et al. (2020), yaitu kondensasi data dari data-data yang telah terkumpul sebelumnya dan diakhiri dengan interpretasi hasil, sehingga menghasilkan representasi yang terstruktur dari temuan penelitian.

III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

3.1 Estimasi Kebutuhan Subjek dan Objek Terdampak Pengadaan Tanah

Pemanfaatan ruang untuk transportasi di Desa Sumberklompok, sesuai RDTR Kawasan Terpadu Batuampar, direncanakan mendukung pengembangan infrastruktur bandara dengan alokasi lahan seluas 323,34 Ha (Gambar 2). Luasan tersebut mencakup hampir setengah dari total Kawasan Kampung Reforma Agraria seluas 637,47 Ha. Alokasi tersebut berpotensi mengubah struktur penggunaan tanah, terutama karena sebagian besar area merupakan tanah redistribusi yang menjadi sumber penghidupan dan aktivitas pertanian masyarakat setempat.

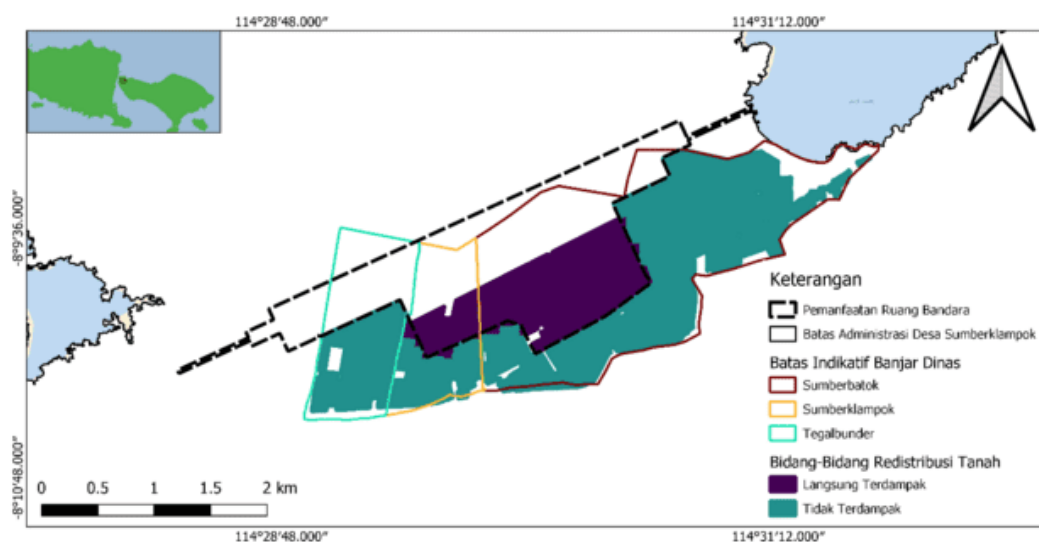


Gambar 2 . Rencana pemanfaatan ruang transportasi bandara di Desa Sumberklompok

Sumber : Kabupaten Buleleng (2023)

Hasil analisis overlay antara bidang redistribusi tanah di Desa Sumberklompok dan pola ruang transportasi udara dalam RDTR Kawasan Terpadu Batuampar menunjukkan bahwa

sebanyak 277 bidang redistribusi tanah langsung terdampak oleh kebutuhan pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur bandara, sementara 1.336 bidang redistribusi tanah lainnya tidak termasuk dalam wilayah yang terdampak (Gambar 3). Dari total bidang yang terdampak, 3,25% merupakan tanah non-pertanian, sementara 96,75% merupakan tanah pertanian. Selain itu, hasil identifikasi subjek kepemilikan menunjukkan bahwa dari 247 pemilik tanah terdampak, mayoritas (68,42%) hanya memiliki satu bidang tanah pertanian, sementara 19,43% memiliki satu bidang tanah non-pertanian, dan 12,15% lainnya memiliki bidang tanah pertanian sekaligus non-pertanian. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi tekanan terhadap keberlanjutan pemanfaatan tanah hasil reforma agraria di Desa Sumberklompok. Komposisi tersebut berimplikasi pada terkonversikannya lahan pertanian menjadi kawasan bandara dan pergeseran struktur mata pencaharian sebagian besar petani pemilik lahan pertanian. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhayati dan Putra (2024). Informasi lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.



Gambar 3 . Bidang redistribusi tanah yang langsung dan tidak terdampak

Sumber : Hasil olahan penulis (2025)

Tabel 3. Rekapitulasi objek bidang redistribusi tanah yang langsung terdampak

Keadaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Bidang	Persentase (%)
Pertanian	114,27	96,75	204	73,65
Non-Pertanian	3,84	3,25	73	26,35
Total	118,11	100,00	277	100,00

Sumber : Hasil olahan penulis (2025)

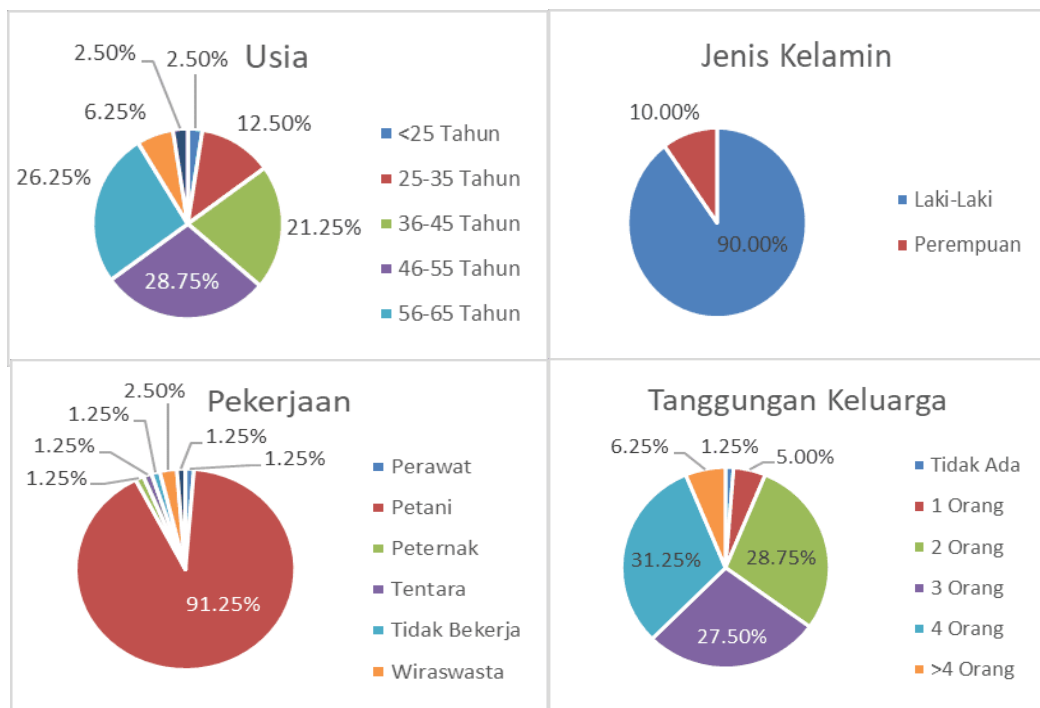
Tabel 4. Rekapitulasi subjek bidang redistribusi tanah yang langsung terdampak

Bidang Tanah yang Dimiliki	Jumlah Pemilik	Persentase (%)
1 bidang tanah pertanian	169	68,42
1 bidang tanah non-pertanian	48	19,43
Bidang tanah pertanian dan non-pertanian	30	12,15
Total	247	100,00

Sumber : Hasil olahan penulis (2025)

3.2 Potensi Dampak Berkelanjutan Pembangunan Bandara Dari Persepsi Masyarakat Terdampak

Setelah jumlah pemilik bidang tanah diketahui, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat potensi dampak pengadaan tanah berdasarkan persepsi masyarakat lokal yang terdampak. Persepsi positif dari masyarakat berperan dalam mendorong dukungan terhadap kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Brida et al., 2011; González-García et al., 2022). Berdasarkan Tabel 4, tercatat 247 pemilik bidang tanah yang berpotensi terdampak oleh kebutuhan pengadaan tanah. Jumlah responden untuk survei ditentukan menggunakan rumus Slovin, yang menghasilkan kebutuhan sampel sebesar 71,18 dan kemudian dibulatkan menjadi 80 orang. Dari jumlah sampel tersebut didapati bahwa mayoritas responden (76,25%) berada pada usia produktif, dengan rincian usia 36-45 tahun (21,25%), 46-55 tahun (28,75%), dan 56-65 tahun (26,25%), dan sebagian besar responden (90,00%) adalah laki-laki. Pekerjaan mayoritas responden (91,25%) adalah sebagai petani. Mayoritas jumlah tanggungan keluarga responden (87,50%) adalah 2-4 orang, dengan rincian jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (28,75%), 3 orang (27,50%) dan 4 orang (31,25%). Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 . Karakteristik responden masyarakat yang berpotensi terdampak
Sumber. Hasil olahan penulis (2025)

Menyelaraskan persepsi masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Namun, rendahnya akses informasi, di mana 93,75% responden tidak mengetahui rencana tata ruang baru untuk pemanfaatan ruang transportasi bandara, mencerminkan minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan hingga disahkannya RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Masyarakat seharusnya

perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk menjamin kepentingan dan keberlanjutan wilayah tetap terjaga, serta diberikan akses informasi mengenai rencana kegiatan agar dapat mencegah tindakan yang bersifat spekulatif dan manipulatif (Sumardjono, 2008).

Sebagai tahapan awal dalam mengkaji potensi dampak berkelanjutan dari pembangunan bandara berdasarkan persepsi masyarakat yang terdampak, dilakukan evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner. Uji validitas dimaksudkan untuk menilai sejauh mana instrumen tersebut mampu secara tepat dan akurat merepresentasikan konstruk yang diteliti, sementara uji reliabilitas, dengan penekanan pada aspek dependabilitas, digunakan untuk menilai tingkat konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu dalam kondisi yang serupa. Berdasarkan hasil analisis, keseluruhan instrumen pengukuran menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai, sehingga dapat diandalkan dalam tahapan analisis lanjutan yang bertujuan mengelaborasi persepsi masyarakat terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan bandara (Tabel 5). Selain itu, temuan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen ini membuka kemungkinan penerapan studi serupa di wilayah lain dengan karakteristik yang sebanding, sehingga memperluas kontribusi akademik dalam memahami implikasi sosial dari pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil survei menggunakan pengukuran Skala Guttman, responden memiliki persepsi bahwa pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur bandara berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka, baik dampak positif maupun negatif. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Skala Guttman pada dimensi keberlanjutan yang mencapai 0,93 dalam rentang 0 hingga 1 (Tabel 6). Hasil skala tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terdampak memiliki kesadaran terhadap potensi dampak signifikan dari pembangunan bandara, sehingga diperlukan strategi yang dapat mendukung keberlanjutan penghidupan mereka. Dalam proses pengadaan tanah, prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah potensi konflik serta menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil antara pemrakarsa proyek dan komunitas lokal (Tata & Kakani, 2008; Voget-Kleschin, 2013). Penerapan prinsip ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan manfaat yang dihasilkan (Freestone, 2009).

Tabel 5. Hasil uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Nilai t	Keterangan
Dimensi Sosial		
a. Mata pencaharian	0,76	Valid
b. Alih profesi	0,68	Valid
c. Bantuan pelatihan	0,68	Valid
d. Nilai dan moral	0,68	Valid
e. Keamanan	0,95	Valid
Dimensi Ekonomi		
a. Usaha lokal	0,96	Valid
b. Sektor perekonomian baru	0,96	Valid
c. Pengadaan tanah	0,91	Valid
d. Kompensasi/ganti kerugian	0,86	Valid
Dimensi Lingkungan		
a. Kualitas tanah dan air	0,96	Valid
b. Kualitas udara	0,95	Valid
c. Kebisingan	0,92	Valid
d. Alih fungsi lahan	0,50	Valid
e. Persampahan	0,95	Valid
Nilai α		Keterangan
0,91		Reliabel

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

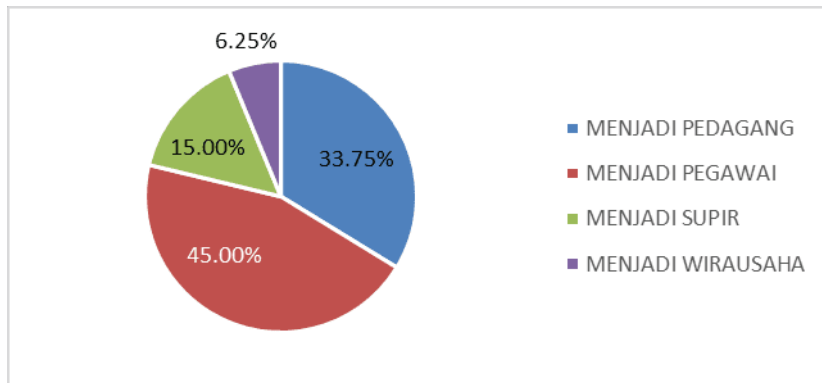
Tabel 6. Nilai Skala Guttman tingkat potensi dampak pembangunan bandara

Variabel	Nilai Skala Guttman	Kategori Potensi Dampak
<u>Dampak Positif</u>		
1. Dimensi Sosial		
- Alih profesi	0,96	
- Bantuan pelatihan	0,98	
2. Dimensi Ekonomi		
- Usaha lokal	0,93	
- Sektor perekonomian baru	0,93	
- Ganti kerugian	0,95	
Rata-rata	0,95	Tinggi
<u>Dampak Negatif</u>		
1. Dimensi Sosial		
- Mata pencaharian	0,95	
- Kepadatan penduduk	0,98	
- Nilai dan moral	0,80	
- Keamanan	0,91	
2. Dimensi Ekonomi		
- Pengadaan tanah	0,90	
3. Dimensi Lingkungan		
- Kualitas tanah dan air	0,93	
- Kualitas udara	0,91	
- Kebisingan	0,94	
- Alih fungsi lahan	0,99	
- Persampahan	0,91	
Rata-rata	0,92	Tinggi
Rata-rata keseluruhan	0,93	Tinggi

Sumber: Hasil olahan penulils (2025)

3.3 Pemetaan Potensi Dampak Berkelanjutan Pembangunan Bandara

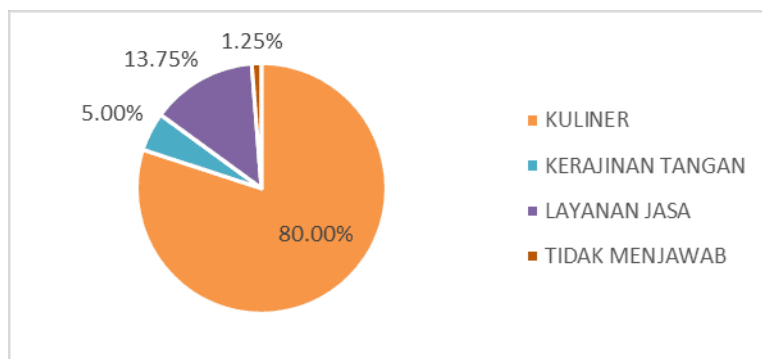
Hasil survei pengukuran Skala Guttman diperkuat dengan argumen yang disampaikan oleh para responden melalui wawancara singkat. Pertama, pada dimensi sosial, responden memandang bahwa pengadaan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara berpotensi membuka peluang ekonomi baru yang signifikan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui perubahan mata pencaharian. Mayoritas responden menyatakan minat untuk beralih profesi menjadi pegawai (45,00%) dan pedagang (33,75%), diikuti oleh pilihan profesi lain seperti wirausaha (15,00%) dan supir (6,25%) (Gambar 5). Namun, responden juga berpendapat bahwa untuk merubah mata pencaharian perlu diimbangi dengan dukungan berupa pelatihan keterampilan dan pengembangan kemampuan yang relevan agar masyarakat dapat secara efektif mengakses peluang ekonomi yang baru, mengingat mayoritas berprofesi sebagai petani. Di sisi lain, para responden juga mengkhawatirkan dampak sosial berupa meningkatnya arus pendatang yang dapat memicu kepadatan penduduk, permasalahan keamanan, serta perubahan terhadap nilai-nilai moral dan kesadaran sosial yang selama ini mereka anut. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlu diseimbangkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjamin manfaat yang berkelanjutan, dan kesadaran publik harus menjadi prioritas dalam perancangan kebijakan guna mengelola dampak sosial pembangunan secara efektif (Guha, 2014; Sadalia et al., 2017).



Gambar 5 . Perubahan mata mencacharian yang diinginkan oleh responden

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Kedua, pada dimensi ekonomi, responden menunjukkan pandangan optimistis terhadap pengadaan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Seluruh responden meyakini bahwa proyek tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru dan menciptakan berbagai peluang usaha lokal yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. Mayoritas responden mengidentifikasi usaha kuliner (80,00%) sebagai sektor yang paling berpotensi berkembang dan diminati, diikuti oleh layanan jasa (13,75%) dan usaha kerajinan tangan (5,00%) (Gambar 6). Pembangunan bandara di suatu wilayah membuka peluang usaha dan penyediaan lapangan kerja di wilayah tersebut (Haryati & Setiyaningrum, 2022). Sikap optimisme tersebut didukung dengan kesediaan seluruh responden menjadikan lahan mereka sebagai objek pengadaan tanah untuk mengukung rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Namun, responden juga berargumen bahwa pentingnya pemberian nilai ganti kerugian yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tanah saat ini, sebagai bentuk penghargaan yang adil terhadap aset mereka serta untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pasca pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi memperburuk kondisi dan tingkat kehidupan masyarakat yang terdampak, sehingga kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan (Ramadhan & Winarsi, 2023). Dengan demikian, dampak positif dari perencanaan tata ruang dan pembangunan terhadap nilai tanah dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan (Mittal & Kashyap, 2015).

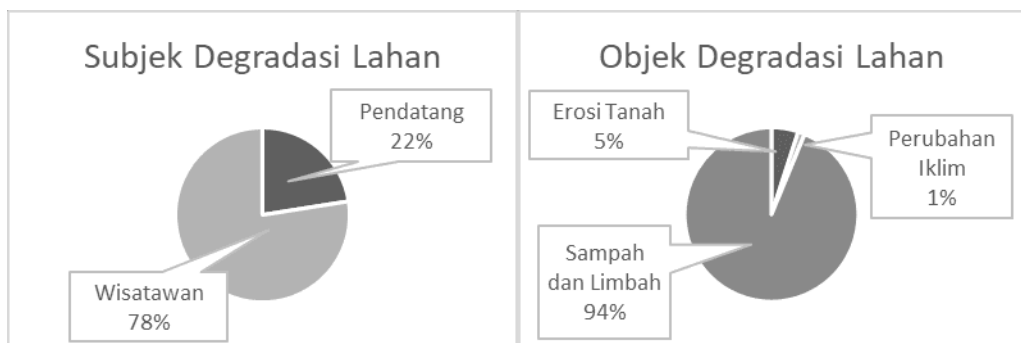


Gambar 6. Usaha lokal yang akan meningkat menurut responden

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Ketiga, pada dimensi lingkungan, responden mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Bali Utara berpotensi menimbulkan

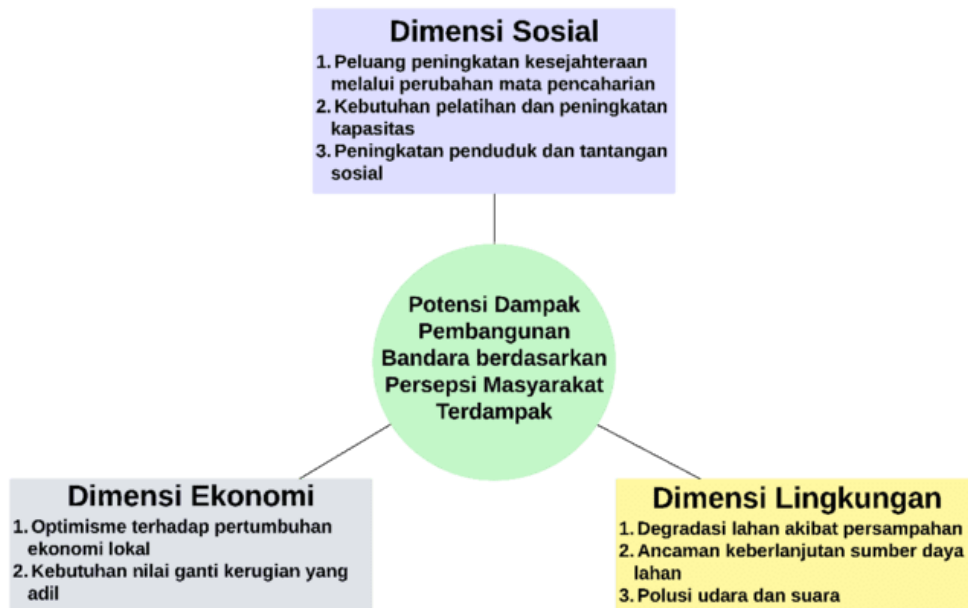
permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Ketidakterpenuhan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dapat mempercepat degradasi lahan, yang berisiko menciptakan tantangan baru bagi masyarakat lokal (Tantja et al., 2021). Responden menyoroti bahwa aktivitas wisatawan (78,00%) serta timbunan sampah (94,00%) menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap degradasi lahan (Gambar 7). Pencemaran lingkungan yang mempercepat degradasi lahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekosistem, tetapi juga meningkatkan kebutuhan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif (Duong et al., 2023). Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan maraknya praktik spekulasi tanah yang dipicu oleh rencana pembangunan bandara. Lemahnya pengelolaan lahan dapat mendorong spekulasi dan penggunaan lahan secara ilegal, yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak guna memastikan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menghormati aspek lingkungan dan sosial-budaya (Wiryasa & Dwijendra, 2021).



Gambar 7 . Subjek dan objek penyumbang degradasi lahan menurut responden

Sumber : Hasil olahan penulis (2025)

Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah teridentifikasi kemudian divisualisasikan secara deskriptif sebagai bentuk interpretasi data yang dikumpulkan melalui penerapan skala Guttman dan hasil wawancara dengan masyarakat terdampak (Gambar 8). Pada aspek sosial, terdapat peluang peningkatan taraf hidup masyarakat melalui transformasi profesi, meskipun di sisi lain muncul tantangan berupa kebutuhan akan program pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta risiko masalah sosial akibat peningkatan populasi. Dalam konteks ekonomi, muncul prospek penguatan ekonomi daerah, namun harus diiringi dengan penerapan skema kompensasi pengadaan tanah yang berkeadilan dan akuntabel untuk mencegah kesenjangan sosial. Adapun pada ranah lingkungan, isu kritis yang terdeteksi meliputi penurunan kualitas lahan karena sistem pengolahan limbah yang belum optimal, ancaman terhadap kelestarian sumber daya tanah, serta efek negatif berupa polusi udara dan suara.



Gambar 8 . Pemetaan potensi dampak berkelanjutan pembangunan bandara dari persepsi masyarakat terdampak

Sumber : Hasil olahan penulis (2025)

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan bagi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur, khususnya dalam konteks pembangunan bandara yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pengadaan tanah, pendekatan yang mengutamakan prinsip keberlanjutan perlu dikombinasikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak negatif sekaligus menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Chourasia et al. (2021) dan Sreenath et al. (2021), yang menyoroti pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan operasional bandara. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan infrastruktur dan menikmati manfaat yang dihasilkan (Freestone, 2009).

Hasil analisis di atas menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal, menyelesaikan potensi konflik, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan (Kumari, 2023). Dengan keterlibatan ini, proses pengadaan tanah dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, yang menghasilkan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat setempat (Quelyoe et al., 2016). Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Pathakakula et al., 2024).

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyoroti potensi dampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Bali Utara dari perspektif keberlanjutan masyarakat terdampak. Secara sosial, masyarakat melihat peluang peningkatan kesejahteraan melalui alih profesi ke sektor non-pertanian, meski memerlukan dukungan pelatihan keterampilan agar transisi ini berhasil. Namun, kekhawatiran muncul terkait peningkatan kepadatan penduduk, perubahan nilai sosial, dan masalah keamanan. Dari aspek ekonomi, optimisme terhadap pertumbuhan usaha lokal diimbangi dengan tuntutan kompensasi tanah yang adil untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Sementara itu, isu lingkungan seperti penurunan kualitas tanah dan air, polusi, serta tekanan terhadap keberlanjutan lahan akibat pengelolaan limbah dan spekulasi tanah menjadi perhatian utama.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pendekatan partisipatif dan transparan harus menjadi prioritas. Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran mereka, sekaligus membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Kebijakan responsif perlu dirancang untuk memastikan kompensasi yang adil, mitigasi dampak lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan akses ekonomi. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan strategi kebijakan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan persepsi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam mengantisipasi dampak jangka panjang pembangunan infrastruktur ini. Dengan pendekatan holistik ini, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Azizah, N. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara (New Yogyakarta International Airport). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2), 76–91.
- Bayoumi, E. O., Elgazzar, S., Abdel Bary, A., & Ricci, S. (2021). The Role of Road Transport Infrastructure Investments on Logistics Performance: A Research Agenda. *International Business Logistics*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.21622/ibl.2021.01.2.016>
- BPN Buleleng. (2021). Laporan Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Buleleng Tahun 2021. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- Brida, J. G., Disegna, M., & Osti, L. (2011). Residents' perceptions of tourism impacts and attitudes towards tourism policies. *Benchmarking: An International Journal*, Forthcoming, 1–30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1839244>
- Chourasia, A. S., Jha, K., & Dalei, N. N. (2021). Development and planning of sustainable airports. *Journal of Public Affairs*, 21(1). <https://doi.org/10.1002/pa.2145>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Duong, M. T. T., Samsura, D. A. A., & van der Krabben, E. (2023). Socio-economic and environmental impacts of land acquisition for tourism development in Vietnam. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2283923>

- Freestone, R. (2009). Planning, sustainability and airport-led urban development. *International Planning Studies*, 14(2), 161–176. <https://doi.org/10.1080/13563470903021217>
- González-García, R. J., Martínez-Rico, G., Bañuls-Lapuerta, F., & Calabuig, F. (2022). Residents' Perception of the Impact of Sports Tourism on Sustainable Social Development. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su14031232>
- Guha, A. (2014). Generating Public Consciousness around Land Acquisition for Private Industries. *Social Change*, 44(2), 205–228. <https://doi.org/10.1177/0049085714525499>
- Haryati, E. S., & Setiyaningrum, L. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Ditinjau dari Perekonomian Masyarakat Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(5), 1334–1342. <https://doi.org/doi.org/10.47467/reslaj.v4i5.1128>
- Heale, R., & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. *Evidence-Based Nursing*, 18(3), 66–67. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129>
- Holtslag-Broekhof, S. M., van Marwijk, R., Beunen, R., & Wiskerke, J. S. C. (2016). Perceived (In)justice of Public Land Acquisition. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 29(2), 167–184. <https://doi.org/10.1007/s10806-015-9594-3>
- ICAO. (2002). *Airport Planning Manual - Part 2 - Land Use and Environmental Control*. International Civil Aviation Organization.
- Jama, A. K., Yulianti, Prihatmadji, W., Caniago, A., & Izzah, N. (2024). The Impact of Tourism Infrastructure and Marketing Strategies on Tourist Arrivals and Local Economic Growth in Bali. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 3(01), 12–24. <https://doi.org/10.58812/esee.v3i01>
- Kabupaten Buleleng. (2023). *Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Batuampar*. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Kartika, D. (2017). LPRA: Lebih dari 50 persen pekerjaan dan tanggung-jawab Pemerintah sudah dilakukan Organisasi Rakyat. *Konferensi Tenurial II*.
- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2024*. Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
- Kumari, V. (2023). People's Participation and Governance Principles Shaping Inclusive Urban Planning. *Interantional Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 07(12), 1–11. <https://doi.org/10.55041/ijrsrem27589>
- Lu-qun, L. (2002). Design of an Optimal Algorithm of Realizing Spatial Overlap Analysis within GIS. *Journal of Shandong Inst. of Min. & Tech.*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Mittal, J., & Kashyap, A. (2015). Real estate market led land development strategies for regional economic corridors - A tale of two mega projects. *Habitat International*, 47, 205–217. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.01.026>
- Nurhayati, N., & Putra, I. M. (2024). Transforming Agricultural Land into Residential Areas: A Socio-Economic Study in Tamiang Subdistrict, Mandailing Natal Regency. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 220–228. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.37176>
- Pathakakula, S., S, P., P, R., Panotra, N., D, T., Upadhyay, L., Meghana, B. S., & Sakhamo, K. (2024). A Critical Review on Fostering Community Involvement in Sustainable

- Horticulture Initiatives. *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(8), 394–404. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2024/v30i82262>
- Pramana, I. M. Y. (2021). A Battery-Powered Tram ready to Operate in Bali; an Answer to Green Energy Public Transportation. *Bali Tourism Journal*, 5(1), 19–22. <https://doi.org/10.36675/btj.v5i1.54>
- Pratiwi, I. A. M., Anandari, I. G. A. A. A., & Saskara, I. A. G. D. (2023). Analisis Sektor Unggulan dan Potensi Ekonomi di Provinsi Bali Pasca Pandemi COVID-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 924–942.
- Quelyoe, F. Y. De, Marlissa, E. R., & Ratang, S. (2016). Study of Community Participation in the Process of Villages Infrastructure Development on Program PNPM Mandiri in Jayapura Regency. *Journal of Social and Development Sciences*, 7(2), 28–31.
- Ramadhan, R., & Winarsi, S. (2023). The Concept of Compensation for Land Rights in Land Procurement for Public Interests. *El -Hekam*, 8(1), 84. <https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9416>
- Rijanta, R., Baiquni, M., Rachmawati, R., & Musthofa, A. (2022). Relocations of the households affected by the development of the New Yogyakarta International Airport, Indonesia: problems and livelihood prospects. *Human Geographies*, 16(2), 191–209. <https://doi.org/10.5719/hgeo.2022.162.5>
- Rosmiati, A., Insan Noor, T., & Lukman Hakim, D. (2020). Profil Lumbung Pangan Berbasis Komunitas (Studi Kasus pada Kelompok Lumbung Pangan “Indra Bakti IV” di Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 7(2), 498–509.
- Sadalia, I., Maas, L. T., & Muda, I. (2017). The Strengthening of Development Capital and Governance towards Sustainable Livelihood in Coastal Areas of Medan. *Academic Journal of Economic Studies*, 3(3), 12–18.
- Sadono, M., Bashory, M. H., Sembiring, J., Medianto, R., Indriyanto, T., & Muhammad, H. (2021). Kajian Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Operasi Bandar Udara Bali Baru. *Warta Ardhia*, 47(2), 129–142.
- Said, S. N. F., & Irwansyah, I. (2019). Land Acquisition by the Government and the Impact for the Community. *Papua Law Journal*, 3(2), 117–133. <https://doi.org/10.31957/plj.v3i2.788>
- Sändig, J. (2021). Contesting large-scale land acquisitions in the Global South. *World Development*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105581>
- Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (1984). *An Introduction to Research Methods*. Rex Book Store.
- Shinyanga, A. J., Malisa, E. T., & Jesse, A. (2023). Perceptions Toward Agricultural Projects in Kishapu. *East African Journal of Agriculture and Biotechnology*, 6(1), 295–305. <https://doi.org/10.37284/eajab.6.1.1431.295>
- Sreenath, S., Sudhakar, K., & Yusop, A. F. (2021). Sustainability at airports: Technologies and best practices from ASEAN countries. *Journal of Environmental Management*, 299(January), 113639. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113639>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kompas Media Nusantara.
- Susanto, H. (2020). Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.820>
- Tantja, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Masyarakat. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 170–182.
- Tata, R. R., & Kakani, R. K. (2008). A Framework for Evaluation of Land Acquisitions in India: Sustainable Development Perspective. XLRI Jamshedpur Working Paper No. 08-12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1313035>
- Utami, W., Kuna, A., & Marini, M. (2023). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i1.37429>
- Utomo, D. L. (2024). Analisis Ketimpangan Wilayah, Keberagaman Aktivitas Ekonomi, dan Identifikasi Sektor Basis di Provinsi Bali. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 70–80. <https://doi.org/10.62099/khapro.v5i2.85>
- Utomo, D. L., Mulyanto, B., & Panuju, D. R. (2025). Kondisi Struktur Agraria dan Modal Penghidupan: Studi Kasus Pasca Reforma Agraria di Desa Sumberklampok. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 181–194. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.90050>
- Voget-Kleschin, L. (2013). Large-Scale Land Acquisition: Evaluating its Environmental Aspects Against the Background of Strong Sustainability. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 26(6), 1105–1126. <https://doi.org/10.1007/s10806-013-9448-9>
- Wiryasa, N. M. A., & Dwijendra, N. K. A. (2021). Socio-physical transformation towards sustainable urban morphology through land readjustment in Indonesia. *Civil Engineering and Architecture*, 9(3), 874–882. <https://doi.org/10.13189/CEA.2021.090329>
- Yulia, L., & Setianingsih, W. (2020). Studi Manajemen Marketing Berbasis Online (Penelitian Pada Umkm Produksi Mebel Di Babakan Muncang Tamansari Kota Tasikmalaya). *Jurnal Maneksi*, 9(1), 346–354. <https://doi.org/10.31959/jm.v9i1.397>